

Judul : Manuver Politik PAN dan PKB di RUU Penyelenggaraan Pemilu
Tanggal : Kamis, 20 Juli 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

Manuver Politik PAN dan PKB di RUU Penyelenggaraan Pemilu



Hari ini, Kamis (20/7), DPR menggelar rapat paripurna, yang salah satu agendanya pengambilan keputusan terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu. Rapat paripurna DPR hari ini akan menjadi titik awal, apakah RUU Pemilu dapat disahkan atau tidak.

Fraksi-fraksi di DPR dan Pemerintah belum menemukan titik temu atas sejumlah isu krusial yang akan diputus di rapat paripurna. Isu yang paling krusial dan selalu mengalami jalan buntu saat pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu adalah soal syarat ambang batas perolehan suara/kursi terkait pen-calonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold/Pres-T*).

Partai koalisi pemerintah terpecah dalam menentukan besaran angka Pres-T. Lima fraksi seperti Partai Golkar, PPP, PDI-P, Partai Hanura, dan Partai Nasdem masih sepakat dengan usulan pemerintah terkait Pres-T sebesar 20%-25%. Sementara, dua partai koalisi pemerintah lainnya, yakni PAN dan PKB, masih belum sepakat dengan usulan pemerintah.

"PAN dan PKB hanya ingin melakukan tawar menawar supaya pemerintah tahu bahwa keberadaan mereka cukup penting di koalisi. Saya kira, pada akhirnya dua fraksi itu akan mendukung opsi pemerintah," ujar sumber *SP* di Jakarta, Kamis (20/7).

Sumber yang juga politisi itu mengakui, hingga Kamis pagi masih sangat sulit untuk melobi semua fraksi agar pengesahan RUU Pemilu dilakukan secara musyawarah. Apalagi, ujarnya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS tetap pada opsi Pres-T sebesar 0%.

Menurutnya, posisi PKB dan PAN cukup penting dalam menentukan angka Pres-T di RUU Pemilu. Sebab, dua fraksi itu memiliki suara yang cukup signifikan di DPR. "Saya kira paripurna hari ini akan berakhir *voting*. Sulit untuk mencapai musyawarah untuk mufakat," ucapnya.

Sumber itu memperkirakan, seluruh fraksi koalisi pemerintah akan bersatu dalam *voting* RUU Penyelenggaraan Pemilu nanti. Dengan demikian, usulan pemerintah agar Pres-T sebesar 20%-25% akan disetujui di rapat paripurna DPR. [H-14]